

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
SANKSI TINDAK PIDANA PEMAKSAN  
PERSETUBUHAN KEPADA ANAK  
(Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Maqshudatul Kamilah

NIM. C93215063



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maqshudatul Kamilah  
NIM : C93215063  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi  
Tindak Pidana Pemaksaan Persetujuan Kepada  
Anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN  
Trg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 September 2019

Saya yang menyatakan



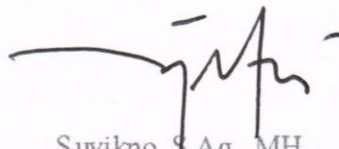
Maqshudatul Kamilah  
NIM. C93215063

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maqshudatul Kamilah, NIM. C93215063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 September 2019

Pembimbing Skripsi,



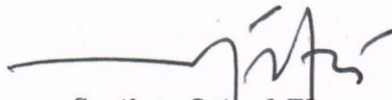
Suyikno, S.Ag., MH.  
NIP. 197307052011011001

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Maqshudatul Kamilah NIM. C93215063 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

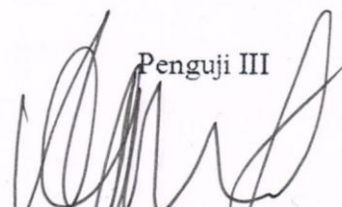
Penguji I

  
Suyikno, S.Ag, MH.  
NIP. 197307052011011001

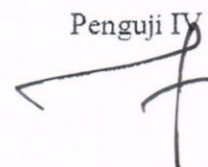
Penguji II

  
Dr. Muwahid, SH, M.Hum  
NIP. 197803102005011004

Penguji III

  
Ahmad Khyobby Ali Rohmat, S.Ag, M.Si.  
NIP. 197809202009011009

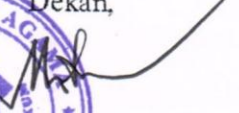
Penguji IV

  
Agus Solikin, S.Pd, M.Si  
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 8 Oktober 2019  
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maqshudatul Kamilah  
NIM : C93215063  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : [maqsudatulkamilah@gmail.com](mailto:maqsudatulkamilah@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA**  
**PEMAKSAAN PERSETUBUHAN KEPADA ANAK : Studi Putusan Nomor**  
**104/Pid.Sus/2018/PN Trg.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Oktober 2019

Penulis

(Maqshudatul Kamilah)



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg)” adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Tenggara nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan untuk bersetubuh yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa yakni berdasarkan pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf D UU RI No. 35 Tahun. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam hal memberatkan dan meringankan terdakwa juga pertimbangan mengenai unsur-unsur dari pasal yang dijatuhkan, Hakim memutus tiga tahun lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan Hakim 3 (tiga) tahun lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam undang-undang perlindungan anak yang mana batas pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana persetubuhan secara paksa dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana zina, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam hal ini yang mendapatkan hukuman *hadd* adalah pelaku yang dapat dijatuhi hukuman rajam sampai mati karena zina yang dilakukan termasuk zina *muhsan*. Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman *hadd* bagi perempuan yang dipaksa untuk bersetubuh.

Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan para Hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih bijaksana serta memperhatikan pula adanya asas legalitas, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang.



A. Deskripsi Kasus .....	53
B. Dakwaan .....	55
C. Tuntutan .....	57
D. Keterangan Saksi-Saksi .....	57
E. Keterangan Terdakwa .....	63
F. Alat Bukti .....	65
G. Pertimbangan Hukum Hakim .....	65
H. Amar Putusan .....	71

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak .....	73
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak Dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg .....	81

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

[illegible]



# BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt memiliki potensi baik dan buruk dalam dirinya, dimana potensi itu harus bisa dikendalikan dengan baik agar bisa terbentuk menjadi kepribadian yang baik dan tidak menyimpang dari tatanan masyarakat. Adanya hukum sendiri untuk mengatur cara berperilaku manusia, yakni tindakan atau perbuatan mana yang boleh atau tidak boleh diperbuat dan akan diterapkan hukuman kepada orang yang melanggar hukum atau aturan yang telah ditetapkan. Baik itu hukum agama atau negara, tujuan adanya hukuman sendiri ialah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar aturan agar tidak mengulangi perbuatan tercela.

Dalam hukum pidana positif dikenal dengan sanksi pidana, sanksi artinya ancaman yang berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum dari norma yang dilanggar.<sup>1</sup>

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.<sup>2</sup>

Diantara banyaknya kejahatan yang ada, kejahatan atau tindak pidana kekerasan seksual salah satunya yang marak terjadi. Kekerasan

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 36.

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 255.

Tindak pidana yang marak di masyarakat termasuk tindak pidana pencabulan, Leden Marpaung mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:<sup>3</sup> “Terhadap anak dan semakin marak terjadi dengan berbagai motif Pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut, yang menjadi Korban yaitu anak-anak yang tidak mengerti dengan keadaan yang sedang mereka alami. Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, pada hakekatnya bersifat pribadi.”

Pendapat Leden Marpaung dapat dikatakan bahwa anak sangat rentan menjadi Korban pencabulan karena kurangnya pemahaman anak terhadap macam-macam atau motif pencabulan yang bisa saja terjadi pada anak tersebut. Tidak hanya pencabulan yang marak terjadi terhadap anak bahkan hal yang lebih kejam pun dapat terjadi seperti persetubuhan dengan paksa atau pemerkosaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 81.

Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.<sup>6</sup>

Islam mengajarkan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Isra' : 17 ayat 31 sebagai berikut:

<sup>6</sup> Ibid., 21.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَقٍ <sup>ط</sup> خُنْ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٠٠﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Q.S. Al-Isra’ : (17): 31).<sup>7</sup>

Contoh kasus mengenai persetubuhan secara paksa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua kandung terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, seperti dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018 PN Trg. Terdakwa yang bernama Eko Sulistiono memaksa anak kandungnya Lailatul Rohmah untuk melakukan persetubuhan. Persetubuhan dilakukan Terdakwa kepada Korban sebanyak 23 kali kejadian tersebut dilakukan Terdakwa ketika anaknya berusia 12 sampai 14 tahun. Bertempat di rumah Terdakwa dan Korban yang bermula ketika Terdakwa bernafsu melihat anak kandungnya Lailatul Rohmah sedang tidur di ruang tamu, untuk mencapai maksud Terdakwa bisa menyetubuhi Lailatul Rohmah, Terdakwa lalu mendekati Korban sambil memijit-mijit kaki Korban, Korban yang kaget berusaha bangun namun ditarik tangannya oleh Terdakwa lalu Terdakwa melakukan aksi bejatnya. Korban pernah menangis dan bilang kepada Terdakwa “jangan pak, jangan pak” tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa bilang ke Korban “jangan bilang mamamu ya, nanti mama sama bapak bisa pisah kalo sampai mamamu tau ini”. Setelah kejadian yang pertama tersebut, Terdakwa

<sup>7</sup> Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahannya, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, T.T.), 285.

menjadi ketagihan berhubungan badan dengan Korban, dimana Terdakwa setelah berhubungan badan selalu berpesan agar Korban tidak lapor mamanya dan dijanjikan oleh Terdakwa akan dikasih uang jajan.

Sebagai orang tua seharusnya bisa menjaga anaknya dengan baik, mengajari hal baik terhadap anaknya dalam sifat, perilaku dan ketaatan agar menjadi pribadi yang baik dan bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua juga masyarakat, tidak malah merusak diri seorang anak apalagi karena ulah dari orang tua sendiri. Akibat dari perbuatan kejahatan seperti kekerasan terhadap anak dapat membuat anak menjadi trauma dan kehilangan rasa percaya diri.

Meskipun perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban pemerintah serta setiap lapisan masyarakat, namun yang menjadi pilar pelindung utama bagi anak adalah keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan paling intim bagi anak, dimana didalam keluarga anak pertama kali melakukan aktifitas sosial, bertumbuh dan berkembang dengan pantauan dan tuntunan oleh orangtuanya. Kewajiban orangtua dapat kita lihat pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dimana menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara

rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).<sup>8</sup>

Larangan persetubuhan secara paksa pada masyarakat mana pun di dunia ini adalah sependapat bahwa tindakan tersebut dilarang dan Pelakunya dikenakan hukuman, jika terbukti. Hal itu, karena unsur pemaksaan dan kekerasan memang terjadi pada jarimah atau tindak pidana persetubuhan secara paksa ini. Dilihat dari sisi pandang hukum pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku tindak pidana persetubuhan secara paksa atau pemerkosaan adalah *ḥadd zina*, bukan berdasarkan *ta'zīr*.<sup>9</sup>

Menurut PAF Laminating dan Djisman Samosir pemerkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya.<sup>10</sup>

Pemeriksaan atau persetubuhan secara paksa dalam bahasa Arab disebut dengan *al-waṭ‘u bi al-ikrah*, *al-waṭ‘u* dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual sementara *bi al-ikrah* ialah dengan paksaan.<sup>11</sup>

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan atau persetubuhan secara paksa baik dalam Al-qur'an

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 1.

<sup>9</sup> Neng Djubaedah, *Perziniaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010). 80-81.

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Jakarta: Refika Aditama, 2001), 41.

<sup>11</sup> Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, Nomor 1, (Juni, 2016), 102.





Pasal 76 D: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Terdakwa atau Pelaku persetubuhan secara paksa adalah ayah kandung dari Korban, dan seharusnya dikenakan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak bagi Terdakwa, sebagaimana isi pasal:

Kalau melihat isi Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa apabila Pelaku tindak pidana adalah orang tua maka ancaman pidana boleh ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) yang

Penulis ingin mengkaji mengapa Hakim memutus dengan hukuman melebihi batas maksimal dari ketentuan dalam undang-undang. Pertimbangan apa saja yang mendasari Hakim dalam menentukan hukuman dalam perkara Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.

[illegible]



Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka Penulis dapat merumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>14</sup>

Dalam pembuatan skripsi ini sebelumnya Penulis melakukan kajian terhadap tulisan-tulisan sebelumnya. Beberapa penelitian dan

[illegible]

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Wahyuni pada tahun 2018 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)”.

Penelitian ini berpusat pada pembahasan mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana persetubuhan yaitu pasal 81 ayat (3) sedangkan yang seharusnya pasal yang dijatuhkan oleh Hakim adalah pasal mengenai pencabulan yaitu pasal 82 ayat (2) karena pencabulanlah yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam persidangan. Pencabulan dilakukan oleh terdakwa kepada Anak dengan adanya kekerasan disertai tipu muslihat dalam setiap perlakuan terdakwa kepada anak didiknya, dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Dewi Wahyuni, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)”. (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).



Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menjadi Pelaku tindak pidana ialah ayah kandung sedangkan korbannya adalah anak kandung yang sudah berumah tangga. Hakim dalam dasar pertimbangan hukumnya menerapkan dua pasal yaitu pasal 289 KUHP dan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dua tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau lebih sering disebut dengan perbarengan tindak pidana sesuai pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>16</sup>

- Skripsi ini lebih membahas mengenai tindak pidana ditinjau dari segi yuridis, menjawab permasalahan terkait bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum Hakim dalam mengadili dan

[illegible]

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini Penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus dari pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya yang masih di bawah umur, hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Hakim seharusnya tidak boleh melebihi ancaman pidana paling banyak yang tercantum dalam ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak. Persetubuhan secara paksa dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandungnya yang masih di bawah umur dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dalam perlakuan terdakwa ketika melakukan persetubuhan kepada anak kandungnya. dalam Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2018 PN Trg. Dalam putusan tersebut, Penulis mengkaji tentang pertimbangan hukum Hakim yang

[illegible]

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoretis maupun secara praktis.

- Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis Penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan penelitian masalah ini, dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak.

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan kata-kata yang ada dalam pembahasan Penulisan skripsi, maka Penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan dalam memahami judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg)”. Adapun yang dimaksud dengan:

- [illegible]

2. Sanksi : Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.<sup>19</sup>
3. Tindak Pidana : Tindak pidana adalah Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik.<sup>20</sup>
4. Persetubuhan : Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>21</sup>
5. Anak : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>22</sup> Yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 14 tahun.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan Peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.





b. Sumber data sekunder

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

c. Sumber data tersier

- 1) Abdul Aziz, Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum);
- 2) Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim;
- 3) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam;
- 4) Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam;

<sup>26</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 85.

- #### 4. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

b. Kepustakaan

Data yang dihimpun yakni buku-buku yang membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan buku tentang hukuman-hukuman dalam hukum pidana islam yang

Buku-buku tersebut yakni: buku berjudul Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum) Penulis Abdul Aziz, buku berjudul Ensiklopedi Muslim Penulis Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, buku berjudul Hukum Pidana Islam Penulis Ahmad Wardi Muslich, buku berjudul Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Penulis Neng Djubaedah, buku berjudul Anak Bukan untuk dihukum Penulis M. Nasir Djamil, buku berjudul Fiqh Jinayah Penulis Nurul Irfan dan Masyrofah, buku berjudul Fiqih Islam Wa Adillatuhu Penulis Wahbah Az-Zuhaili.

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

Dalam hal ini Penulis akan memeriksa kembali kelengkapan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, kejelasan makna tentang sanksi tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak, sesuai data-data dari kepustakaan.

[illegible]



Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami Penulisan skripsi. Oleh karena itu, dalam Penulisan skripsi ini Penulis membaginya dalam 5 (lima) pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini diuraikan tentang Pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[illegible]

Bab ketiga, akan memaparkan hasil dari penelitian yang terdiri dari: deskripsi kasus, dakwaan dan tuntutan, keterangan saksi dan terdakwa, alat bukti, pertimbangan dan dasar hukum Hakim, dan amar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong perkara Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Bab keempat, berisi mengenai hasil analisis kualitatif yakni analisis mengenai pertimbangan dan dasar hukum Hakim, dan analisis hukum pidana Islam mengenai hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



### A. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam dan Macam-macamnya

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

Kata *ḥudūd* adalah bentuk jamak dari kata *ḥadd*. Pada dasarnya *ḥadd* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut bahasa, *ḥadd* berarti cegahan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut *ḥudūd* karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk

25

mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum.<sup>2</sup>

*Hudūd* adalah sanksi atau ancaman yang telah ditentukan secara jelas di dalam alquran dan hadis. Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ḥadd* (*ḥudūd*) secara terminologis ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.<sup>3</sup>

Tindakan maksiat yang sanksinya termasuk bagian dari *ḥudūd*, dan yang wajib dikenai sanksi ḥadd ada enam macam yaitu: zina, *liwath* (homo seksual), *qadzaf*, minum khamar, pencurian, *riddah*, *hirabah*, dan *bughat*.<sup>4</sup>

## 2. Jarimah *Qisās* dan *Diyāt*

*Qisās* adalah turunan dari kata *qashsha* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak), dan membalas.<sup>5</sup>

*Diyat* secara etimologi berasal dari kata *wada-yadi-wadayan-diyatan* yang berarti mengalir. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah kata mashdar (*diyat*) berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayat*).<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 46.

<sup>3</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 14.

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariquul Izzah, 2002), 20.

<sup>5</sup> Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2.

<sup>6</sup> Ibid., 3.

Jarimah *qisās diyāt* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qathlul khatar*), penganiayaan sengaja (*al-jurhul ama*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jurhul khata*).<sup>7</sup>

Secara bahasa, *ta'zīr* bermakna *al-man'u* (pencegahan). Menurut istilah, *ta'zīr* bermakna, *at-ta'dib* (pendidikan) dan *at-tankil* (pengekangan).<sup>8</sup> Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zīr* merupakan bentuk jarimah, yang sanksi hukumnya ditentukan penguasa. Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah dan *qisās* atau *diyāt* yang macam dan bentuk hukuman telah ditentukan oleh syara'.<sup>9</sup>

a. Jarimah *ḥudud* atau *qisās-diyāt* yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi *ta'zīr*, seperti:

<sup>9</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani..., 75.

- ## B. Persetubuhan Secara Paksa dalam Hukum Pidana Islam

Adapun pengertian tentang zina mukrah adalah pemerkosaan dalam bahasa arab disebut *al-waṭ‘u bi al-ikrah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seseorang perempuan, seluruh

<sup>11</sup> Ibid., 14.



Setiap persetubuhan yang diharamkan adalah zina.<sup>17</sup>

Akan tetapi Fukaha berbeda pendapat dalam mengkualifikasikan persetubuhan yang diharamkan tersebut yang berakibat pada hukuman dera atau rajam (*hadd* zina) sebagaimana dikemukakan dalam al-qur'an dan al-sunnah.<sup>18</sup> Definisi tentang zina menurut beberapa madzhab sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, diantaranya:<sup>19</sup>

a. Menurut Hanafiyah:

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

### b. Menurut Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhaddap *farji* (vagina) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 117.

<sup>18</sup> Ibid., 117-118.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7-8.

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap kubul (*farji*) maupun dubur.

Apabila kita perhatikan dari beberapa definisi tersebut diatas, maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan. Tidak masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Namun ada juga yang memahami bahwa zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami istri.<sup>20</sup>

Kata “zina” ini dimaksudkan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan

[illegible]



keluarga yang mendasar dan berbagai persoalan hidup yang ada di masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Jarimah Zina

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agamapun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>22</sup>

Adapun hukuman perzinaan itu adalah sebagai berikut.

Terdapat beberapa ayat al-qur'an yang mengharamkan jarimah zina ini, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra’ (17): 32).<sup>23</sup>

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa mendekati zina saja dilarang dan tidak diperbolehkan lebih-lebih sampai melakukan perbuatan tersebut.

Dalam ayat lain dalam al-qur'an mengenai hukuman bagi pezina, yakni dalam surat Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990), 340.

<sup>22</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 18.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahannya. (Kudus: CV. Mubarakatan Thovvibah, T.T.), 349.

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-qur'an Azhim, Juz I, halaman 462 dinyatakan sebagai berikut:<sup>25</sup> Pada permulaan Islam hukuman perzinaan bagi seorang wanita ialah hukuman tahanan rumah sampai mati. Hal ini bila perzinaannya itu ditetapkan dengan keterangan empat orang saksi yang adil dari kaum laki-laki. Adapun kaum laki-laki diberi hukuman caci maki, dipermalukan di muka khalayak ramai, dan dipukul dengan sepatu.

Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 15 dan 16:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاستَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا<sup>ط</sup> فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٧﴾

<sup>25</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). 547-548.

Ibnu Katsir berkata bahwa menurut keterangan Ibnu Abbas, hukuman itu telah berlaku sedemikian rupa, hingga Allah menurunkan surat An-Nur ayat 2, yang menyatakan tentang hukuman jilid atau cambuk sebanyak 100 kali atau haddis mengenai rajam (dilempar dengan batu), sehingga ayat ini dinasakh (diubah hukumnya) dengan ayat dan hadis tersebut.<sup>27</sup>

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي». قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا. الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالْثَّيْبِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ. (رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي)

<sup>26</sup> Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahannya..., 79.  
<sup>27</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i*..., 548.  
<sup>28</sup> Abdul Aziz, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, T.T.), 2579-2580.

### 3. Unsur-Unsur Perzinaan

a. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina.


1) Persetujuan dalam *farji*

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 8.

Memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya dianggap zina walaupun zakar masuk kedalam liang vagina tanpa menyentuh dindingnya. Meskipun tidak mengeluarkan sperma, memasukkan pucuk zakar tetap dianggap zina. Meskipun ada pelapis antara penis dan vagina, selama pelapisnya tipis dan tidak menghalangi rasa dan kenikmatan, persetubuhan tetap dianggap zina.<sup>30</sup>

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syi'ah Imamiyah, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan, baik dalam kubul maupun dubur, pada laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama. Pendapat ini juga disepakati oleh Muhammad dan Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Alasan mereka menyamakan persetubuhan dubur dan zina dalam satu makna sehingga menyebabkan wajibnya hukuman-hukuman *ḥudūd* adalah adanya persetubuhan yang diharamkan. Ia termasuk zina, terutama karena Al-qur'an telah menyamakan keduanya.

[illegible]


**اَلْعَلَمِينَ**

3) Orang berakal dan baligh menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila

Imam Abu Hanifah mewajibkan hukuman *ḥudūd* atas orang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan seusiannya yang bisa disetubuhi. Alasannya persetubuhan ini adalah zina dan adanya uzur di pihak lain tidak menggugurkan hukuman *ḥudūd* atasnya.

[illegible]

4) Menyetubuhi mahram

5) Persetubuhan dalam pernikahan yang batal

6) Rela disetubuhi

[illegible]



7) Menyetubuhi perempuan yang wajib di *qisās*

8) Tidak mampu mengajukan syubhat

Ketidakmampuan mengajukan syubhat tidak dianggap syubhat mereka mengatakan bahwa orang bisu dan orang gila wajib dijatuhi hukuman *ḥudūd* jika zinanya ditetapkan berdasarkan bukti, mereka juga menerima pengakuan orang yang bisu yang menggunakan tulisan dan bahasa isyarat selama isyaratnya bisa dipahami tanpa ada keraguan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*, 167.

[illegible]

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

*ta'zīr*.<sup>33</sup>

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan

[illegible]

Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, seorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi ia memasuki kamar yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya maka perbuatan tidak dianggap zina karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya, di negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak diterima. Dengan demikian apabila seorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka

[illegible]

#### 4. Macam-Macam Zina dan Hukumannya

a. *Zina ghairu muhsan*

<sup>35</sup> Ibid., 26.

<sup>36</sup> Ibid., 29.

Apabila jejaka dan perawan melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Berdasarkan Q.S. an-Nur: 2 sebagai berikut:

الرَّابَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur (24): 2)<sup>37</sup>

Untuk hukuman dera atau *jilid* dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Disyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa mengakibatkan luka. Di samping itu, juga disyaratkan ekor atau ujung cambuk tersebut tidak boleh lebih dari satu. Apabila ekor cambuk lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila yang terhukum adalah seorang laki-laki, maka bajunya harus dibuka kecuali yang menutupi auratnya. Sedangkan menurut

<sup>37</sup> Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahannya..., 349.

2) Hukuman pengasingan selama setahun

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنَنَ سَيِّئًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالْثَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّحْمُ. (رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي)

<sup>38</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzhabi al-Arba'ah*, Juz 5, (Beirut: Dar al Fikr, 1972), 47.

<sup>39</sup> Abdul Aziz, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum)*..., 2579-2580.

Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahanan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.<sup>40</sup>

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami atau beristri).

[illegible]



1) Hukuman dera seratus kali

## 2) Hukuman rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Sementara dalam pelaksanaan hukuman rajam, eksekusi bagi pelaku zina yang sudah menikah sebagai berikut; Apabila orang yang akan dirajam itu laki-laki, hukuman dilaksanakan dengan berdiri tanpa dimasukkan ke dalam lubang dan tanpa dipegang atau diikat, hal ini didasarkan haddis Rasulullah saw, ketika merajam Ma'iz dan orang Yahudi.<sup>42</sup> Apabila ia melarikan diri dan pembuktiannya dengan pengakuan, maka ia tidak perlu dikejar dan hukuman dihentikan, apabila pembuktiannya

<sup>42</sup> Ibid., 57.



Hukuman dera (*flogging*) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi'i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (*ghairu muhsan*), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tercela.<sup>46</sup>

## 5. Pembuktian Sanksi Jarimah Zina

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 30.



Akan tetapi tidak semua orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Ada syarat-syarat persaksian yang berlaku untuk semua jarimah,, yaitu.<sup>52</sup>

- Ada pula syarat-syarat khusus untuk persaksian jarimah zina yaitu.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Ibid., 49.



c. Pembuktian dengan *Qarinah*

Pembuktian lain dalam *ḥadd* zina adalah pembuktian dengan *qarinah* (tanda atau petunjuk). *Qarinah* atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Disamakan dengan wanita yang tidak bersuami, wanita kawin dengan anak kecil yang belum balig, atau dengan orang yang sudah balig, tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan.<sup>56</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila tidak ada bukti lain untuk jarimah zina selain kehamilan maka apabila wanita itu mengaku bahwa ia di paksa, atau persetubuhan terjadi karena syubhat, maka tidak ada hukuman *ḥadd* baginya. Demikian pula apabila tidak mengaku dipaksa atau tidak pula mengaku terjadi syubhat dalam persetubuhannya, maka ia juga tidak dikenai hukuman *ḥadd*, selama ia tidak mengaku berbuat zina, karena hukuman *ḥadd* itu harus dibuktikan dengan saksi atau pengakuan. <sup>57</sup>

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 55.

<sup>57</sup> Ibid., 56.





Kartanegara, di Rt.27 Desa Sebuntal Kec. Marang ayu dan di Rt.15 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, gabungan berupa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri”, yaitu seorang anak perempuan yang bernama Lailatul Rohmah sejak masih berumur 12 - 14 tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Kejadian pertama pada tahun 2015, saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah, saat itu istri Terdakwa sedang tidur di kamar, Terdakwa bernafsu melihat anak kandungnya Lailatul Rohmah sedang tidur di ruang tamu untuk mencapai maksud Terdakwa bisa menyetubuhi Lailatul Rohmah Terdakwa lalu mendekati korban sambil memijit-mijit kaki korban, korban yang kaget berusaha bangun namun ditarik tangannya oleh Terdakwa dibaringkan dan dilepas celana dalam korban melebarkan kedua paha korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mengancam korban “..Jangan bilang-bilang mamamu ya, nanti bapak bisa pisah dengan mamamu kalau mamamu sampai tahu..!”. Saat kejadian pertama tersebut, umur korban Lailatul Rohmah masih 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di kelas 6 SD, dan setelah kejadian yang pertama tersebut, Terdakwa menjadi ketagihan

Pada saat ini status korban Sdri. Lailatul Rohmah adalah masih anak yakni masih berusia 14 tahun diketahui dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Kukar bahwa Lailatul Rohmah terlahir pada tanggal 01 Desember 2003 dan masih duduk di Kelas 2 SMP.

Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan surat dakwaan untuk Eko Sulistiono dengan dakwaan *alternatif* yang mana Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang sudah diputuskan oleh jaksa penuntut umum yang lebih mendekati pada perbuatan terdakwa.<sup>2</sup>

1. Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

[illegible]

Pasal 81 ayat (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 65 ayat (1): “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Pasal 81 ayat (2): “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 65 ayat (1): “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”



Saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat persetubuhan tersebut dan Anak Saksi Lailatul sebelumnya juga tidak pernah menceritakan kepada saksi.

- Anak saksi selaku korban adalah anak kandung dari Terdakwa, Anak Saksi menerangkan bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali dan saksi tidak ingat kapan waktu pastinya tetapi hampir setiap bulan saksi disetubuhi oleh Terdakwa. Bahwa pertama kali Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada waktu saksi kelas 6 (enam) SD, untuk hari dan tanggal lupa sekitar Bulan Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wita ditempat tinggal kami di Gunung Menangis, setelah itu keluarga Anak Saksi pindah rumah lagi tinggal di kampung kutai Marangkayu dan Anak Saksi juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa di tempat tersebut, kemudian kami sekeluarga pindah

lagi di Desa Sebuntal RT.15 Marangkayu dan ditempat tersebut terakhir kalinya saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira jam 20.30 wita dan setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi pada waktu malam hari ketika orang dirumah sudah tidur;

Bahwa umur Anak Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan yaitu 14 (empat belas) tahun. Anak Saksi jelaskan cara Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yaitu awalnya Terdakwa memijat-mijat kaki saksi saat tidur, kemudian celana panjang dan celana dalam Anak Saksi diturunkan sampai telanjang separo badan, lalu langsung ditindis, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi sampai dengan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Saksi, kemudian untuk persetubuhan berikutnya dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;

Bahwa Anak Saksi pernah menangis dan bilang kepada Terdakwa “Jangan Pak, Jangan Pak” tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan tersebut. Kemudian Terdakwa bilang ke Anak Saksi “Jangan Bilang Mamamu Ya, Nanti Mama Sama Bapak Bisa Pisah Kalo Sampai Mamamu Tau Ini”. Bahwa yang Anak Saksi rasakan akibat persetubuhan tersebut rasa sakit dikemaluan Anak Saksi dan ada keluar darah dari kemaluan Anak Saksi, sehingga pada saat buang air kecil Anak Saksi merasakan sakit dikemaluan Anak Saksi;



### 3. Basir Bin Mustamin

Saksi menerangkan sesuai pengakuan Terdakwa bahwa melakukan persetubuhan tersebut sudah lama, sejak Anak Saksi Lailatul duduk dibangku sekolah kelas VI hingga korban duduk dibangku kelas II SMP, dan perbuatan tersebut dilakukan diruma Terdakwa di RT.27 Ds. Sebuntal dan RT.15 Ds. Sebuntal Kec. Marangkayu Kab. Kukar.;

[illegible]

#### 4. Norsamsiah Binti Abdul Hamid

Saksi menerangkan Bahwa saksi mengetahui perkara ini pada bulan Juli 16 sekira jam 18.45 wita, pada saat hendak mandi ke kamar mandi saksi, kemudian tidak sengaja melihat dari lubang atau cela yang ada di kamar mandi saksi ke arah dapur dari rumah yang ditinggali Terdakwa betapa kagetnya saksi melihat dengan baik baik bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam posisi berhadapan dengan Anak Saksi Lailatul dan saksi lihat Anak Saksi Lailatul sedang menggunakan sarung yang kemudian sarung tersebut dinaikkan atau diangkat hingga sebatas bawah dada dan kemudian Terdakwa saat itu menggunakan kaos dan celana pendek, dan Terdakwa, saksi lihat menurunkan bagian depan dari celana pendeknya (sehingga dapat mengeluarkan kemaluannya) yang selanjutnya merapatkan badannya kearah Anak Saksi Lailatul (posisi memeluk) dan menggoyangkan pinggulnya berkali-kali hingga kurang lebih 5 (lima) menit sambil menoleh kearah pintu mempehatikan kondisi sekitar, selanjutnya saksi lihat Terdakwa dan Anak Saksi Lailatul berganti posisi yang mana Anak Saksi Lailatul posisinya membelakangi membungkuk) Terdakwa lalu kemudian Anak Saksi Lailatul kembali menaikkan atau menarik sarungnya hingga setengan bertelanjang lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi Lailatul dari arah belakang kemudian mengeluarkan kemaluannya dari celana pendeknya dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi Lailatul dan

menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa berjalan kearah kamar mandi dan Anak Saksi Lailatul masuk dalam ruang rumahnya;

Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung menceritakan kepada Saksi Sumarlik yang merupakan tetangga saksi. Saksi menerangkan bahwa saksi hanya melihat kejadian persetubuhan tersebut baru sekali ini saja. Saksi menerangkan sepengetahuan saksi usia korban Lailatul pada saat disetubuhi oleh Terdakwa berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP kelas II.

## 5. Sumarlik Binti Sugiono

Saksi mengetahui persetubuhan tersebut dari Saksi Norsamsiah yang menceritakan kepada saksi bahwa kemarin sore menjelang magrib ada melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Saksi Lailatul dapur tempat cuci piring, kemudian Saksi Norsamsiah menunjuka dimana tempatnya. Saksi menerangkan jarak lokasi dari Saksi Norsamsiah melihat kejadian tersebut kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter.

Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga saksi. Bahwa umur Anak Saksi Lailatul pada saat disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih 13 (tiga belas) tahun.





istri Terdakwa;

11. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan perbuatan itu Terdakwa lakukan adalah karena nafsu birahi.

## F. Alat Bukti

Barang bukti yang diajukan di Persidangan terkait perkara, yaitu:<sup>6</sup>

1. 1 (satu) Buah baju lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu
2. 1 (satu) Buah rok berwarna hijau tua
3. 1 (satu) Buah celana dalam berwarna merah muda
4. 1 (satu) Buah BRA berwarna putih les merah muda

## G. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa Eko Sulistiono, akan lebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.<sup>7</sup>

- a. Hal-hal yang memberatkan

<sup>6</sup> Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, 12.

<sup>7</sup> Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, 18.

[illegible]





Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (R. Soesilo Kitab UndangUndang Hukum Pidana Politeia-Bogor 1996, hlm. 209);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sekitar tahun 2015 di rumah kontrakan Gunung Menangis, RT.21, Desa Sebuntal, Kec. Marangkayu, kab. Kutai Kartanegara Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa menggerayangi atau memegang bagian kemaluan korban selang waktu setengah jam nafsu Terdakwa memuncak kemudian Terdakwa langsung menaikkan rok dan menurunkan celana dalamnya sebatas lutut dan kemudian Terdakwa menghadap korban yang tidur dengan posisi terlentang lalu memegang tangannya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke bagian kemaluan korban namun tidak sepenuhnya hingga

ejakulasi dan Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar.

Kemudian ditahun 2016 dirumah kontrakan di RT.21 Desa Sebuntal Kec.Marangkayu dan di RT.27 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu sebanyak 12 (dua belas) kali, ditempat yang berbeda-beda dilakukan dengan cara sama seperti sebelumnya.

Lalu di tahun 2017 bertempat di belakang tower RT.15 Desa  
Sebuntal Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 8  
(delapan) kali dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa menyetubuhi korban biasa melakukannya dengan cara menarik tangannya dan Terdakwa tindih badannya dan pegang tangannya hingga korban tidak dapat bergerak dan kemudian setelah itu Terdakwa setubuhi dimana setelah Terdakwa setubuhi korban, Terdakwa selalu mengatakan “Jangan Bilang Bilang Mama, Mama Sama Bapak Bisa Pisah Kalo Sampek Tau” selain itu Terdakwa sering bilang “Jangan Bilang-Bilang Ya ... Nanti Nda Bapa Kasih Uang Jajan”, sehingga sampai sekarang korban tidak pernah bilang kepada siapa pun.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban tidak pernah meminta persetujuan kepada korban.

Terdakwa menerangkan bahwa umur korban pada saat Terdakwa setubuhi sekitar 14 (empat belas) tahun dimana korban lahir pada tanggal 01 Desember 2003.

c. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi.

Sesuai dengan putusan dalam perkara ini dengan susunan Majelis Hakim meliputi Titis Tri Wulandari, S.H.,S.Psi.,M.Hum. sebagai Hakim ketua, Hakim anggotanya terdiri dari dua orang yaitu Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H. Masye Kumaunang, S.H. dibantu dengan Panitera Pengganti A. Rizal Pahlevi, S.H. Majelis Hakim memutus perkara terdakwa tersebut dengan menggunakan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.<sup>9</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Eko Sulistiono bin Suwarni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Beberapa Kali Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, serta denda sejumlah

[illegible]

Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Buah baju lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu
  - b. 1 (satu) Buah rok berwarna hijau tua
  - c. 1 (satu) Buah celana dalam berwarna merah muda
  - d. 1 (satu) Buah BRA berwarna putih les merah mudaDikembalikan kepada Anak Saksi Lailatul Rohmah binti Eko Sulistiono
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

**A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak**

Produk yang dihasilkan Hakim adalah suatu putusan. Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka.<sup>2</sup> Putusan bukan saja akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari Hakim yang memutusnya namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di masa mendatang. Secara substansial putusan merupakan kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani yang

<sup>2</sup> Tholib Efendi, *Praktik Pengadilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 217.



dikemas dengan mengambil teori-teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis, dan yuridis.<sup>3</sup>



b. Unsur kedua, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Unsur kedua ini unsur yang bersifat alternatif yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Pengertian memaksa secara umum adalah mengajak atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu perbuatan dimana seseorang tersebut secara batin tidak menerima melakukan perbuatan tersebut.

[illegible]

c. Unsur ketiga, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan disini ialah persetubuhan secara paksa yang dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu yang berbeda.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan oleh pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pembedaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya Terdakwa haruslah dihukum karena kesalahannya.

## 2. Unsur yang memberatkan dan meringankan Terdakwa

Dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan dan menjatuhkan pidana, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- [illegible]



Dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa unsur pidana yang dilanggar oleh Terdakwa menjurus pada pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana hukumannya paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Namun disini Hakim memutus hukuman kepada Terdakwa dengan pidana 18 (delapan belas) tahun penjara yang artinya putusan Hakim tiga tahun lebih banyak dari ancaman pidana maksimal dalam undang-undang perlindungan anak.

Terdakwa atau Pelaku persetubuhan secara paksa dalam putusan ini adalah ayah kandung dari Korban, dan seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana isi pasal:

Pasal 81 ayat (3): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

[illegible]

Kalau melihat isi Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa apabila Pelaku tindak pidana adalah orang tua maka ancaman pidana boleh ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) yang artinya Pelaku dapat dikenai hukuman lebih dari hukuman yang paling lama yaitu bisa melebihi pidana penjara 15 tahun. Namun dalam tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa dituntut dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2), majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) yang mana ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara artinya tidak boleh lebih dari 15 tahun penjara.

Jadi penerapan hukuman bagi Terdakwa Eko Sulistiono dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun telah melampaui atau melebihi batas maksimum dari ketentuan yang ada dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ancaman pidana maksimal pada umumnya dijatuhkan apabila tidak ada sama sekali keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa, namun dalam persidangan telah dipaparkan mengenai hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa Eko Sulistiono belum pernah di hukum yang artinya sebelum terjerat kasus ini Terdakwa belum pernah



Hal tersebut seharusnya menjadi alasan Terdakwa Eko Sulistiono di hukum dengan pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena tujuan penghukuman sendiri adalah sebagai pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.<sup>5</sup>

Kasus dalam putusan pengadilan negeri tenggarong Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, Terdakwa yang bernama Eko Sulistiono dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan melanggar hukum, yaitu melakukan tindak pidana persetubuhan secara paksa atau pemerkosaan.

<sup>5</sup> Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 256.

Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur zina dalam hukum pidana Islam. Pertama, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan yang diharamkan yakni persetubuhan yang terdakwa lakukan ke dalam *farji* korban, namun persetubuhan tersebut tidak dikehendaki oleh korban yang artinya Terdakwa sendiri yang menginginkan adanya persetubuhan tersebut dengan cara memaksa korban. Kedua, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, Terdakwa atau pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya, dan yang menjadi korban adalah anak kandung Terdakwa.

[illegible]



Dalam putusan pengadilan negeri Tenggarong, hanya ada satu saksi yang melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Lailatul Rohmah, namun dalam persidangan juga Terdakwa memberikan keterangan bahwa telah melakukan ancaman kepada korban yaitu anak kandungnya untuk melakukan persetubuhan dengannya, hal ini berarti Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang melawan hukum dengan memerkosa anak kandungnya yang masih di bawah umur.

Dengan adanya persaksian dari satu saksi dan pengakuan dari Terdakwa selaku pelaku pemerkosaan, maka pembuktian dalam tindak pidana zina terpenuhi yang mengharuskan Terdakwa dihukum dengan hukuman *ḥadd* zina. Karena Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan dengan akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan

<sup>9</sup> Ibid., 54.

kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.<sup>10</sup>

Dalam putusan pengadilan negeri Tenggarong Nomor: 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan bila ditinjau dari sisi hukum pidana Islam tidak ditemukan kesesuaian dengan hukum positif di Indonesia seperti dalam putusan pengadilan tersebut karena dalam hal ini penjatuhan sanksi hukuman dilakukan oleh seorang Hakim, sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana perkosaan merupakan jarimah zina yang di hukumi *hadd*, *hadd* merupakan hukuman yang sudah diatur oleh Allah swt, jadi sudah seharusnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah dihukum mati dengan cara dirajam, sebagaimana hukuman yang berlaku untuk pezina muhsan.

Secara yuridis formal, sanksi pidana Islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya bila hukum itu diundangkan oleh sebuah negara. Hukum pidana Islam belum dapat diterapkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, Karena Indonesia tidak memberlakukan hukuman *ḥudūd* dalam tindak pidana zina. Hukuman ta'zīr-lah yang bisa diterapkan di Indonesia karena hukuman ta'zīr merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau *ulil amri*.<sup>11</sup> Yang dalam putusan pengadilan ini hukuman ditentukan dan diputus oleh majelis Hakim.

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 154.

<sup>11</sup> Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, Nomor 1, (Juli, 2018), 125.









- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasan, Mustofa dan Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Jahar, Asep Saepudin, et al. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis – Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Banten: Kencana, 2013.
- Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mas'ud, Ibnu dan S., Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat)*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.
- Mubarok, Jaih dan Faizal, Enceng Arif. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Musthofa, Adib Bisri dan dkk, *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Maarif, 1996.

- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tim Penyusun: Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: TP, 2016.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Jakarta: Refika Aditama, 2001.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Kutawaringin, Arya Putra Negara. *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Zuhdi dan Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.
- Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahannya. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, T.T.
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Trg.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Nomor 1, Volume 16, Juli 2018.
- Wahyuni, Fitri. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Media Hukum*, Nomor 1, Volume 23, Juni 2016.
- Isnaini, Nur. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dan Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung (Studi Direktori Putusan

Wahyuni, Dewi. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)”. Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.